

MENGATASI KETIMPANGAN AKSESIBILITAS DAERAH MITRA IKN 2024

Policy Brief ini Ditujukan kepada:

- Bappenas
- Kementerian PUPR
- Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Mitra IKN

Tim Penulis

- Dewi Sartika
- Mayahayati Kusumaningrum
- Ricky Noor Permadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ibu Kota pusat pemerintahan RI akan segera berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Proses perpindahan tersebut memerlukan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur bagi daerah di Kalimantan sebagai kawasan Mitra IKN. Beberapa permasalahan yang mencuat akhir-akhir ini adalah kondisi infrastruktur yang menghubungkan antar daerah Mitra IKN menuju IKN belum terkoneksi dengan baik. Hal tersebut diperparah dengan kondisi jalan yang belum seutuhnya dalam kondisi baik. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, *Policy Brief* ini menghadirkan tiga rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan secara simultan berdasarkan tingkat kesanggupan dan keberdayaan daerah penyangga atau bantuan dari Pemerintah pusat dan kolaborasi dengan swasta.

PENDAHULUAN

Ibu Kota pusat pemerintahan RI telah ditetapkan berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Proses perpindahan tersebut memerlukan kesiapan infrastruktur dan suprastruktur bagi daerah di Kalimantan Timur sebagai kawasan Mitra IKN. Sehingga pemerintah pusat, IKN dan daerah dituntut untuk mengakselerasi pembangunan dalam rangka mendukung dan menunjang aktivitas IKN kedepan.

Salah satu hal utama yang perlu dipersiapkan adalah interkoneksi atau keterhubungan antar daerah penyangga di IKN. Pembangunan Interkoneksi daerah di sekitar IKN yang telah direncanakan sebelumnya adalah pembangunan jaringan infrastruktur darat “backbone” regional yang menghubungkan Balikpapan – IKN – Samarinda berupa jaringan jalan tol, jalan arteri primer/sekunder (jalan nasional), dan jalur rel kereta api, sebagaimana tertuang pada Perpres 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Tahun 2022-2042.

Selanjutnya untuk semakin memudahkan perjalanan menuju IKN, terdapat dua jembatan raksasa megah yang melintasi laut (teluk) akan menjadi ikon kebanggaan IKN, yakni jembatan pulau Balang 1 (dengan bentang 708 meter) dan jembatan pulau Balang 2 (berbentang “Pendek” 470 meter) (Kompas.com, 2023).

Kedua, pemenuhan kebutuhan logistik dan sumberdaya IKN tentunya akan menjadi beban bagi kawasan disekitarnya, sehingga diperlukan konektivitas antar wilayah agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, kawasan Mitra IKN merupakan gerbang dan pintu masuk bagi daerah yang berbatasan langsung, baik pada level provinsi (Kalsel, Kaltara, Sulawesi) maupun antar negara (Brunei Darusalam dan Malaysia).

Dengan kondisi diatas, menjadi sangat penting untuk membangun interkoneksi daerah Mitra IKN, berupa ketersediaan infrastruktur jalan dan integrasi jaringan transportasi publik antarmoda guna membangun interkoneksi daerah Mitra IKN. Hal ini akan memastikan bahwa manfaat dari pemindahan IKN tidak hanya dirasakan oleh daerah sekitar IKN saja, tetapi juga oleh wilayah-wilayah lain yang membutuhkan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan tersebut.

DESKRIPSI MASALAH

Sinergisitas Pembangunan daerah Mitra IKN tentu membutuhkan interkoneksi antar daerah Mitra IKN. Beberapa permasalahan tersebut disebabkan oleh:

01. Konektivitas Infrastruktur yang belum memadai

Daerah-daerah penyangga di sekitar IKN belum terkoneksi dengan infrastruktur jalan, dermaga dan transportasi yang memadai. Saat ini, hanya Samarinda dan Balikpapan sudah terkoneksi dengan baik yang dimudahkan dengan keberadaan tol. Sedangkan daerah penyangga lain seperti Kabupaten Paser, PPU, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur dan Berau masih belum memiliki akses jalan dan moda angkutan yang memadai. Sehingga dibutuhkan infrastruktur jalan dan fasilitas infrastruktur transportasi lain yang lebih memadai.

Sebagai contoh, akses perjalanan IKN – Balikpapan – Samarinda, hanya ditempuh dalam waktu 1 jam perjalanan dengan keberadaan Tol yang dapat mempersingkat waktu perjalanan, namun akses perjalanan IKN – PPU – Paser yang merupakan pintu masuk arah selatan dari Provinsi Kalsel dan Kalteng mesti ditempuh dalam waktu sekira 6-8 jam perjalanan. Sementara akses IKN – Kutim – Berau yang merupakan gerbang akses masuk provinsi Kaltara harus memakan waktu sekitar 14 hingga 20 jam perjalanan.

Pada prinsipnya atau kondisi idealnya, kawasan IKN harus bisa diakses dari seluruh daerah di Inonesia bahkan antar negara yang dapat dilalui dengan berbagai moda transportasi. Diharapkan kedepan akan terbangun jalur *highway* yang dapat menghubungkan antar negara tetangga di perbatasan, yakni jalur IKN – Brunei Darussalam – Malaysia.

02. Distribusi logistik dalam menunjang Pembangunan dan keberlanjutan IKN

Dilansir dari Chief Economist Samudera Indonesia Research and Initiatives, Denny Irawan menjelaskan setidaknya terdapat tiga tantangan logistik dalam pembangunan IKN. Tantangan pertama terkait dengan logistik di darat (intra IKN). Kemudian tantangan kedua adalah kepelabuhanan atau kebandaraan, pergudangan, dan terakhir yaitu jalur penghubung dengan wilayah lain (darat, laut, dan udara). Tantangan logistik di jalur darat atau intra IKN, lanjutnya, berkaitan dengan akses jalan untuk kebutuhan barang dan material pada proses konstruksi serta akses terhadap kebutuhan penunjang seperti air bersih.

Keberadaan pembangunan IKN dan keberlanjutan eksisting IKN, sangat bergantung pada kawasan sekitarnya untuk menunjang kebutuhan sumberdaya dan logistik IKN, yang tidak mungkin dapat terpenuhi sendiri dari kawasan inti IKN. Potensi daerah sekitar IKN untuk memproduksi dan menyuplai kebutuhan logistik di IKN harus dibarengi dengan ketersediaan moda angkutan yang dapat memperlancar arus barang dan jasa serta mobilisasi manusia dari kawasan disekitar IKN. Saat ini distribusi logistik antar pulau di Kaltim hanya melalui dua simpul, yakni Pelabuhan peti kemas Kariangau Balikpapan dan pelabuhan peti kemas Palaran di Samarinda.

03. Ketidaksiapan akses daerah Mitra IKN

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan akses daerah mitra/ penyangga dengan desain IKN yang modern, canggih, transportasi cerdas ramah lingkungan, dan lengkap aksesnya. Berbagai moda transportasi darat seperti *Bus Rapid Transit* (BRT) listrik hingga layanan taksi, mobil rental dan bus. Untuk mendukung konektivitas IKN juga sedang disiapkan bandara IKN yang modern ramah lingkungan namun tetap menonjolkan kearifan lokal. Juga penyediaan ART, MRT dan kereta cepat di IKN. (dephub.go.id). Saat ini juga telah dilakukan percepatan pembangunan jalan tol menuju kawasan inti IKN. Pesat dan modernnya pembangunan di IKN harus diimbangi dan disupport daerah mitra/penyangga sehingga hadirnya IKN benar-benar dirasakan baiknya, dan "tidak maju sendiri" dan "meminggirkan" daerah mitra/penyangga.

ALTERNATIF SOLUSI

Strategi #01

Memasukkan kebutuhan interkoneksi antardaerah ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Penyangga. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan interkoneksi tinggi seperti Pembangunan jalan tol, jalur kereta api, jaringan listrik dan saluran air yang mendukung kebutuhan utama yakni mobilitas, distribusi logistik dan akses ke layanan publik. Mengintegrasikan analisis kebutuhan dan proyek interkoneksi ke dalam dokumen RPJPD dengan menyertakan peta jalan atau rencana aksi yang detil mencakup tahapan implementasi dan indikator keberhasilan. Dengan sumber pendanaan dapat berupa dari Anggaran Daerah, bantuan pemerintah pusat, investasi swasta dan sebagainya serta dapat merancang skema pembiayaan yang inklusif dengan melibatkan swasta publik seperti *Public-Private Partnership* (PPP) dalam pembangunan infrastruktur antar wilayah.

Strategi #02

Dalam menyiapkan jalur distribusi logistik, Pemerintah pusat, Otorita IKN dan pemerintah daerah penyangga harus membentuk tim kerja antar daerah untuk menyiapkan kebutuhan prioritas yang dibutuhkan IKN serta potensi keunggulan komparatif daerah penyangga dalam menyediakan logistik bagi IKN, misalnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan PPU sebagai kawasan *food estate* atau Kota Bontang dan Kutai Timur dengan produksi hasil kelautan dan sebagainya, sehingga interkoneksi antar daerah dapat terbangun dengan mengoptimalkan potensi keunggulan komparatif wilayah masing-masing. Dengan membuat perjanjian kerja sama antar pemerintah daerah untuk pembiayaan, operasional, dan pemeliharaan infrastruktur bersama.

Strategi #03

Membangun banyak alternatif koneksi wilayah sehingga perlu kebijakan khusus dari kementerian/lembaga untuk memperkuat infrastruktur Mitra IKN dengan tanpa melupakan orientasi pembangunan masing-masing daerah mitra IKN karena mitra IKN tidak hanya Balikpapan dan Samarinda saja. Hal ini dapat dilakukan dengan Membangun integrasi jaringan transportasi publik antarmoda yakni kereta api antarkota, kereta bandara, bus listrik BRT, Transportasi Massal Cepat (MRT), dan kemungkinan besar *driverless taxi*.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Mengingat Tingkat urgensinya maka beberapa alternatif kebijakan yang telah disusun dapat dijalankan secara simultan berdasarkan tingkat urgensi dan kesanggupan Pemerintah Daerah Mitra IKN. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan jika tidak membangun kolaborasi seluruh pemerintah daerah penyangga dan pihak terkait. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dapat dilakukan dengan skema kolaborasi dengan pihak swasta, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki nilai komersial. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kaltim. 2022. Strategi Pembangunan Daerah yang Inter-Koneksi Terhadap Rencana Pembangunan IKN.
- BPS. 2020. Panjang Jalan Negara Menurut Kondisi Jalan dan Kabupaten/Kota (Km), 2020.
- kompas.com. 2023. Integrasi Transportasi Publik di IKN Nusantara.
- kompas.com. 2021. Menuntaskan Konektivitas di Trans-Kalimantan
- kumparan.com. 2022. Mengetahui Apa Saja Bandara di Kalimantan dan Lokasinya.
- Liputan6.com. 2019. Mengintip Rencana Sistem Transportasi Canggih di Ibu Kota Baru RI.
- kaltim.tribunnews.com. 2022. Perbatasan Antar Provinsi di Kalimantan Bakal Dibangun Jalan Pintas ke IKN.